

RENCANA STRATEGIS

PEMBANGUNAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA, 2018 - 2022



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PERIKANAN 2017

Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya

Muatan materi RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2018-2022 merupakan hasil pemikiran dan analisis kebutuhan strategis pembangunan perikanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan selama periode 2018-2022 yang didasarkan pada indikator-indikator capaian yang SMART dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Jayapura periode 2018-2022,

“Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern Berbasis Kearifan Lokal”.

RENSTRA ini merupakan pegangan dan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan perikanan di Kota Jayapura sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam periode perencanaan 2018 – 2022.

Jayapura, 2017
Kepala Perikanan Kota Jayapura

Elsye P. Rumbekwan, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508281997122001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR		Hal i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA		
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		3
1.3 Maksud dan Tujuan		3
1.4 Sistematika Penulisan		4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN		6
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi		6
2.2 Sumberdaya Dinas Perikanan		25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan		32
1. Produksi Perikanan Tangkap		32
2. Produksi Perikanan Budidaya		39
3. Pengolahan Hasil Perikanan		47
4. Tingkat Konsumsi Ikan		48
5. Produksi benih Ikan Air Tawar		49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		51
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan		54
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah		54
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian KKP		58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah		60
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		63
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis		65
BAB IV. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		66
1. Visi dan Misi Kepala Daerah		66
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah		66
3. Tujuan dan Sasaran		67
4. Strategi dan Kebijakan OPD		68
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		72
1. Program dan Kegiatan		72
2. Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran untuk mewujudkan Misi Kelima		73
BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD MENGACU PADA RPJMD		85
BAB VII. PENUTUP		93

Daftar Tabel

No.	Uraian	Hal.
1.	Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	25
2.	Data Pegawai berdasarkan Usia	25
3.	Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	26
4.	Data Pegawai menurut Golongan	26
5.	Data Pegawai menurut Diklat Struktural	27
6.	Peralatan dan Mesin (Sarana Perkantoran)	28
7.	Sarana Pendukung Kegiatan Pengawasan	28
8.	Sarana Pendukung Operasional BBIL	29
9.	Sarana Pendukung Operasional Outlet P2HP	30
10.	Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional	30
11.	Produksi Perikanan Tangkap	32
12.	Produksi Perikanan Tangkap perjenis ikan	33
13.	Jumlah Nelayan	34
14.	Perkembangan Jumlah dan Jenis Armada Tangkap	35
15.	Perkembangan Jumlah dan Jenis Alat Tangkap	38
16.	Produksi Perikanan per Jenis Budidaya	44
17.	Jumlah Pembudidaya Ikan	45
18.	Luasan Areal Budidaya	46
19.	Produksi Olahan Hasil Perikanan	47
20.	Perkembangan Jumlah UPI	48
21.	Capaian Peningkatan Konsumsi Ikan	49
22.	Data Produksi Benih ikan di UPR dan BBIL	50
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	67
4.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	68
4.3.	Strategis dan Kebijakan RENSTRA	69
5.2.	Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Indikator	74
6.1.	Indikator Kinerja Daerah yang Berhubungan Tupoksi	85
6.2.	Indikator Kinerja Kunci	86

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kota Jayapura merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Jayapura sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Perikanan khususnya dalam wilayah Kota Jayapura. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Perikanan seperti yang tertuang dalam Keputusan Walikota Jayapura nomor 31 Tahun 2016 tersebut adalah :

1) Melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan;

2) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi dibidang perikanan;

3) Pelaksanaan teknis operasional di bidang perikanan;

4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang perikanan;

5) Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan;

6) Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya perikanan;

7) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan;

8) Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perikanan Kota Jayapura mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

2. Seksi Kenelayanan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;

2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :

1. Seksi Bina Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;

2. Seksi Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan;

3. Seksi Sarana, Prasarana dan Sistem Logistik Produk Perikanan;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Perikanan Kota Jayapura, sebagai berikut :

a) SEKRETARIAT

1) Tugas

Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan dan pelaporan dinas.

2) Fungsi

- Pengelolaan urusan administrasi umum;
- Pengelolaan urusan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- Pengelolaan urusan perlengkapan; dan
- Pengelolaan perencanaan dan pelaporan dinas.

3) Tugas Sub-Sub Bagian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a) Melaksanakan administrasi keuangan dan asset, meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset.
- b) Menghimpun rencana program dan kegiatan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan informasi pembangunan perikanan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.

b) BIDANG PERIKANAN TANGKAP

1. Tugas

Merumuskan norma dasar dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di Bidang Perikanan Tangkap.

2. Fungsi

- a) Penyusunan rencana, kriteria, prosudur pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkelanjutan, Pengembangan Kenelayanan, dan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- b) Penyusunan rencana, target, kriteria, dan prosudur pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkelanjutan, Pengembangan Kenelayanan, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- c) Penyusunan rencana, kriteria, dan prosudur pelaksanaan penerapan aplikasi teknologi Perikanan Tangkap sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah dan komoditi sasaran;
- d) Penyusunan kebutuhan, rencana, prosudur dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Perikanan Tangkap sesuai kebutuhan;
- e) Penyusunan rencana, sasaran, kriteria, prosudur pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Kenelayanan, serta Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap.

3. Tugas dan Fungsi Seksi – seksi

1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- b. Melaksanakan penyediaan data dan informasi perikanan tangkap;
- c. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan;
- d. Melaksanakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi perikanan tangkap;
- e. Melaksanakan pengendalian usaha perikanan tangkap;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi dan pemanfaatan sumber daya ikan;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan inventarisasi kondisi dan kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data statistik perikanan tangkap.
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan pemetaan waktu pergerakan ikan, serta pelaksanaan kebijakan tata kelola pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan;
- d. Penyiapan bahan, penyusunan norma, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi perikanan tangkap sesuai kebutuhan dan standart teknis; .
- e. Penyiapan bahan, penyusunan norma, prosudur, dan pelaksanaan kebijakan pengendalian usaha perikanan tangkap sesuai ketentuan dan standart teknis;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Sumberdaya Ikan.

2) Seksi Kenelayanan

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan penanganan masalah Kenelayanan;
- b. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi;
- c. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia perikanan tangkap;
- d. Melaksanakan diversifikasi usaha nelayan;
- e. Melaksanakan fasilitasi jaminan usaha kenelayanan;
- f. Melaksanakan fasilitasi kemitrausahaan perikanan tangkap;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan nelayan dan usahanya.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan, perumusan, serta pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan pengembangan usaha, kebutuhan pengembangan SDM, dan potensi pengembangan usaha perikanan tangkap.
- b. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM perikanan tangkap sesuai kebutuhan;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan, dan sertifikasi usaha perikanan tangkap.

- d. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan diversifikasi usaha perikanan tangkap sesuai standart teknis.
- e. Penyiapan bahan, perumusan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kemitraan usaha perikanan tangkap.
- f. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan Jaminan Usaha Kenelayanan sesuai aturan yang berlaku.
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan usaha dan diversifikasi usaha, sertifikasi dan kemitrausahaan usaha perikanan tangkap.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
- b. Melaksanakan pengembangan armada, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, dan sarana penanganan hasil tangkapan di atas kapal;
- c. Menyiapkan prasarana penunjang perikanan tangkap;
- d. Melaksanakan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) sesuai standarisasi teknis;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan sarana prasarana perikanan tangkap dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, penyusunan norma, dan pelaksanaan kebijakan identifikasi kondisi dan kebutuhan pengembangan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, serta rehabilitasi prasarana dasar dan penunjang perikanan tangkap sesuai kebutuhan dan standarisasi teknis;
- b. Penyiapan bahan, penyusunan norma, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, serta rehabilitasi prasarana dasar dan penunjang perikanan tangkap sesuai kebutuhan dan standarisasi teknis;
- c. Penyiapan bahan, penyusunan norma, kriteria, dan pelaksanaan bantuan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, prasarana penunjang perikanan tangkap, pengembangan armada tangkap, alat tangkap, alat bantu penangkapan, sarana penanganan hasil tangkap di atas kapal, serta rehabilitasi prasarana dasar dan penunjang perikanan tangkap;
- d. Penyiapan bahan, perumusan norma, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pengembangan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitas pendukung, dan sistem pelayanan sesuai standarisasi teknis;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap, serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

c) **BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA :**

1. **Tugas**

Merumuskan norma dasar dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di Bidang Perikanan Budidaya.

2. **Fungsi**

- a. Penyusunan rencana, kriteria, prosudur, dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi kebutuhan dan pengembangan Produksi Perikanan Budidaya, kebutuhan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, serta kebutuhan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di kawasan pengembangan;
- b. Penyusunan rencana, target, kriteria, prosudur, dan sasaran pelaksanaan pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Usaha, serta pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di kawasan pengembangan sesuai kebutuhan dan standarisasi teknis;
- c. Penyusunan rencana, kriteria, dan prosudur pelaksanaan penerapan aplikasi teknologi Perikanan Budidaya terbaru di kawasan pengembangan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah;
- d. Penyusunan kebutuhan, rencana, prosudur dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan;
- e. Penyusunan rencana, kriteria, perumusan standarisasi pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan, dan Pengembangan Operasional UPTD Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Kota Jayapura;
- f. Penyusunan rencana, sasaran, kriteria, prosudur pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan Perkembangan Produksi, Pengembangan Usaha, dan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, serta perkembangan dan pelaksanaan UPTD BBIL.

3. **Tugas Seksi – seksi**

1) **Seksi Produksi Perikanan Budidaya**

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan peningkatan produksi perikanan budidaya;
- b. Melaksanakan sistem dan prosudur peningkatan produksi Perikanan Budidaya;
- c. Melaksanakan penyediaan data dan informasi Perikanan Budidaya;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem perbenihan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. Melaksanakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi Budidaya ikan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan produksi perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan pengembangan dan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut, baik ikan konsumsi maupun ikan hias;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar, air payau dan laut, baik ikan konsumsi maupun ikan hias di kawasan pengembangan sesuai standart teknis;

- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- d. Penyiapan bahan, penyusunan norma dasar, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan perbenihan ikan konsumsi dan ikan hias sesuai kebutuhan dan standart teknis;
- e. Penyiapan bahan, penyusunan norma dasar, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan budidaya ikan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungannya di kawasan pengembangan budidaya perikanan;
- f. Penyiapan bahan, penyusunan norma dasar, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi dan informasi teknologi perikanan budidaya sesuai kebutuhan;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan produksi perikanan.

2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya baik pembesaran maupun perbenihan sesuai kebutuhan;
- b. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perikanan budidaya;
- c. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha budidaya ikan;
- d. Melaksanakan pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan, baik pembesaran maupun perbenihan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kemitrausahaan perikanan budidaya;
- f. Melaksanakan pengendalian usaha budidaya;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan usaha budidaya ikan, baik pembesaran maupun perbenihan..

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan, perumusan, serta pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan pengembangan usaha, kebutuhan pengembangan SDM, dan potensi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM perikanan budidaya sesuai kebutuhan;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha budidaya ikan;
- d. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan unggulan daerah sesuai kebutuhan pasar dan standart teknis di kawasan pengembangan;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kemitrausahaan perikanan budidaya di kawasan pengembangan;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengendalian usaha budidaya ikan;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan perkembangan usaha dan diversifikasi usaha, sertifikasi dan kemitrausahaan budidaya ikan.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana produksi perikanan budidaya, baik pembesaran maupun perbenihan di kawasan pengembangan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan perikanan budidaya;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi dan pemanfaatan sarana prasarana produksi, serta perkembangan kawasan perikanan budidaya;

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pengembangan dan peningkatan produksi dan prasarana kawasan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penyediaan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana prasarana produksi dan prasarana kawasan pengembangan sesuai kebutuhan dan standart teknis;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan sarana prasarana perikanan budidaya.

d) BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

1. Tugas

Merumuskan norma dasar dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana, kriteria, prosudur, serta pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan, Promosi dan Akses Pasar, serta Sarana Prasarana dan Sistem Logistik Perikanan;
- b. Penyusunan rencana, terget, kriteria, dan prosudur pelaksanaan pengembangan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, serta pelaksanaan Pengawasan Peredaran Produk Perikanan;
- c. Penyusunan rencana dan prosudur peningkatan Promosi dan Perluasan Akses Pasar Produk Perikanan;
- d. Penyusunan rencana, kriteria, prosudur, dan melaksanakan Pengembangan SDM Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
- e. Penyusunan rencana, kriteria, dan perumusan standarisasi, serta melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, dan Pengembangan Operasional UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
- f. Penyusunan rencana, sasaran, kriteria, prosudur, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan, Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan, Pemanfaatan Sarana Prasarana dan Sistem Logistik, serta perkembangan dan operasional UPTD P2HP.

3. Tugas Seksi – seksi

1) Seksi Bina Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan

Tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi dan penyediaan data dan informasi pengolahan produk perikanan;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pembinaan dan pengembangan usaha dan produk olahan hasil perikanan;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu produk perikanan;
- d. Melaksanakan diversifikasi produk perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- e. Melaksanakan pengembangan SDM Pengolah produk perikanan;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan usaha dan diversifikasi produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi pengolahan produk perikanan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengembangan usaha dan produk perikanan bernilai tambah;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu produk perikanan sesuai standart teknis;
- d. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan diversifikasi produk perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM Pengolah produk perikanan;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sertifikasi usaha;
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan usaha dan diversifikasi produk perikanan.

2) Seksi Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan

Tugas :

- a. Melaksanakan penyediaan data dan informasi pemasaran produk perikanan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran, serta promosi produk perikanan;
- c. Melaksanakan penguatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
- d. Melaksanakan fasilitasi kemitrausahaan pemasaran produk perikanan;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kemasan dan labeling produk perikanan;
- f. Melaksanakan pengembangan SDM Pemasar produk perikanan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan akses pasar dan promosi produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penyediaan data, informasi pemasaran, dan pemetaan kebutuhan pasar produk perikanan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan penguatan dan perluasan jaringan pemasaran, serta produk perikanan;
- c. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, serta pelaksanaan kebijakan penguatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
- d. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemitrausahaan pemasaran produk perikanan;
- e. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kemasan dan labeling produk perikanan;
- f. Penyiapan bahan, perumusan, kriteria, serta pelaksanaan kebijakan pembinaan SDM Pemasaran produk perikanan; .
- g. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan.

3) Seksi Sarana, Prasarana dan Sistem Logistik Produk Perikanan

Tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan Unit Pengolahan produk perikanan;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi sistem logistik produk perikanan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan identifikasi kondisi dan kebutuhan sarana prasarana dan sitem logistik produk perikanan;
- b. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan penyediaan, pengembangan, rehabilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. Penyusunan bahan, perumusan, dan pelaksanaan penguatan sitem logistik produk perikanan;
- d. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan sarana prasarana produk perikanan.

e. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH

1. UPTD Balai Benih Ikan Lokal

Tugas :

Melaksanakan kebijakan Dinas Perikanan untuk pengembangan perbenihan ikan air tawar yang meliputi :

- a. Melaksanakan penyediaan calon induk PS sesuai kebutuhan;

- b. Menyediakan benih berkualitas untuk usaha budidaya, dan benih untuk kebutuhan *stocking* dan *restocking*;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan;
- d. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan calon induk ikan budidaya;
- e. Melaksanakan pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) ikan air tawar;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) benih ikan yang didistribusi keluar daerah;
- g. Memfasilitasi sertifikasi benih dan usaha perbenihan ikan air tawar;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan SDM perbenihan ikan air tawar;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBIL

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan kebutuhan benih dan calon induk PS di kawasan pengembangan perikanan budidaya; (*baru*)
- b. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan manajemen perbenihan sesuai standart teknis dan kondisi BBIL; (*baru*)
- c. Penyiapan bahan, perumusan, prosudur, dan pelaksanaan penyediaan dan peredaran Calon Induk dan benih unggul di kawasan pengembangan perikanan budidaya; serta benih ikan untuk *stocking* dan *restocking*; (*baru*)
- d. Penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan dan pakan ikan alternatif; (*baru*)
- e. Penyiapan bahan, perumusan dan melaksanakan pendampingan UPR ikan air tawar;
- f. Penyusunan bahan, rencana, dan memfasilitasi sertifikasi benih dan usaha perbenihan ikan air tawar;
- g. Penyiapan standart, kriteria, prosudur penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Calon Induk dan benih ikan yang di distribusikan keluar daerah; (*baru*)
- h. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pembinaan SDM perbenihan ikan air tawar. (*baru*)
- i. Penyiapan bahan dan rencana melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBIL.

2. UPTD Outlet Pemasaran Hasil Perikanan

Tugas :

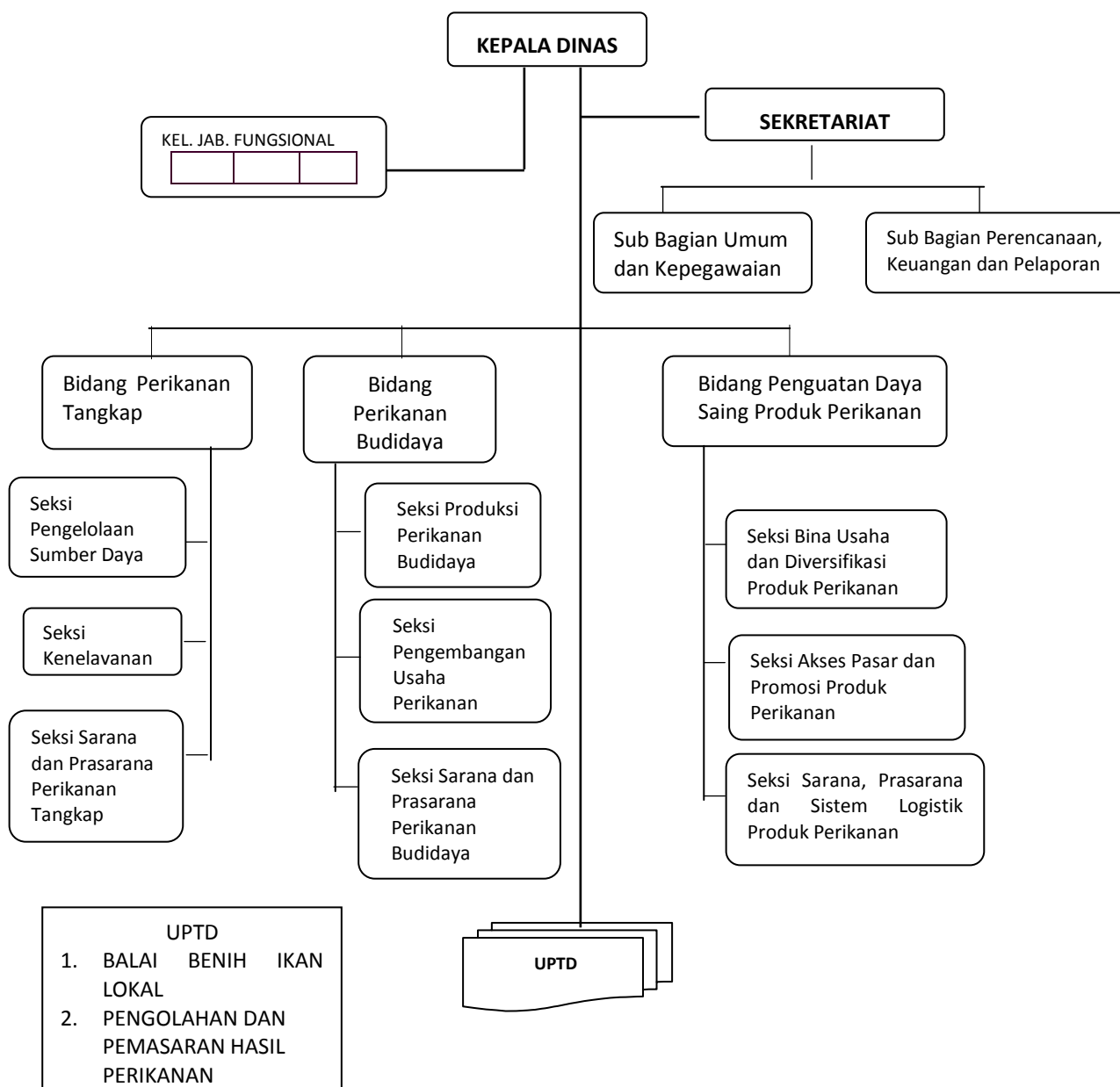
melaksanakan kebijakan dinas terkait:

- a. Melaksanakan pengujian mutu produk perikanan;
- b. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang disitribusi ke luar daerah;
- c. Melaksanakan ujicoba penerapan teknologi pengolahan produk perikanan tepat guna;
- d. Memfasilitasi pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. Memfasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran;
- f. Memfasilitasi pembinaan SDM Pengolah dan Pemasar produk perikanan;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan, rumusan, dan standart pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan;
- b. Penyiapan standart, kriteria, prosudur penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang didistribusikan keluar daerah;
- c. Penyiapan bahan, rumusan, standart, dan pelaksanaan Ujicoba penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan tepat guna;
- d. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. Penyiapan bahan, rencana, serta memfasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran;
- f. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pembinaan SDM Pengolah dan Pemasar hasil perikanan;
- g. Penyiapan bahan dan rencana melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.



2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan

1) Sumberdaya Manusia (SDM)

Untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adatif, responsif, tanggap dan aspiratif.

Guna memperlancar tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kota Jayapura didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 51 orang (data per desember 2016).

Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin sesuai jabatan dari tahun sebelum 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin sesuai Jabatan

Jabatan	Laki-laki					Perempuan					Jumlah
	≤2012	2013	2014	2015	2016	≤ 2012	2013	2014	2015	2016	
Kepala Dinas						1					1
Sekretaris								1			1
Kepala Bidang	2							1			3
Kasubag/Kasie/UPTD	2		3			4		2			11
Staf	16			4		13			2		35
Jumlah	28					23					51

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Optimalisasi pegawai di Dinas Perikanan Kota Jayapura diharapkan dapat dilaksanakan secara baik dikarenakan mayoritas pegawai berada pada usia produktif yakni pada rentang 25 tahun – 45 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Pegawai berdasarkan usia

USIA (tahun)	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (Orang)
25 – 35	11	5	16
36 – 45	11	15	26
46 – 56	6	3	9
TOTAL	28	23	51

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Keadaan Pegawai di lingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan sesuai Jabatan

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				Jumlah (orang)
	S2	S1/D.IV	D.II/D.III	SMU/SMK	
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	1
Kepala Bidang	3	-	-	-	3
Kasubag/Kasie/UPTD	2	9	-	-	11
Staf	2	16	7	10	35
TOTAL	9	25	7	10	51

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada dilingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan prosentase 66,67 %

berpendidikan S1 dan S2. Diharapkan prosentase ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan SDM di Dinas Perikanan Kota Jayapura.

Dilihat dari Golongan, pegawai di Dinas Perikanan Kota Jayapura, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebanyak 32 orang (62,74%). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Data Pegawai menurut Golongan sesuai Jabatan

JABATAN	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah (orang)
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	1
Kepala Bidang	1	2	-	3
Kasubag/Kasie/UPTD	-	11	-	11
Staf	-	18	17	35
TOTAL	3	32	16	51

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Perkembangan Pegawai di lingkungan Dinas Perikanan Kota Jayapura berdasarkan diklat penjenjangan struktural dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural

JABATAN	PIM II	PIM III	PIM IV	Jumlah (orang)
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretaris	-	1	(1)	1
Kepala Bidang	-	3	(3)	3
Kasubag/Kasie/UPTD	-	-	7	7
TOTAL	1	4	7	12

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

2) Sumber Daya Sarana Prasarana Pendukung

a) Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Dalam melaksanakan aktifitas rutin, Dinas Perikanan menempati Gedung Otonom Lantai 2 Kantor Walikota Jayapura.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan perkantoran yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perikanan, antara lain :

**Tabel.6 Peralatan dan Mesin (Sarana Perkantoran)
Pendukung Operasional Dinas**

No.	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1.	Meja 1 biro	11
2.	Meja ½ biro	45
3.	Meja Rapat	1
4.	Kursi Putar	8
5.	Kursi Kerja	49
6.	Kursi Rapat	38
7.	Lemari Arsip/data	20
8.	Kursi Sofa	4
9.	Papan Data	12
10.	Laptop	10
11.	Printer	18
12.	Proyektor LCD	3
13.	Komputer PC lengkap	5
14.	Mesin Ketik listrik	3
15.	Wireless	5
16.	AC Split	4
17.	Kipas Angin	7
18.	Brankas	1
19.	Lemari Es	1
20.	Genset	2

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016

Peralatan dan mesin penunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perikanan khususnya untuk pengawasan sumber daya laut adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel.7 Sarana Pendukung kegiatan Pengawasan Sumber
Daya Laut, Tahun 2016**

No.	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1.	Handy Talkie (HT)	5
2.	Radio Repeater	1
3.	GPS Map Include DS	4
4.	Teropong Marine Use	2
5.	Water Cheker	1
6.	Life Jacket	10
7.	Senter Waterproof	3
9.	Baju dan Peralatan Menyelam	3
10.	Pelampung Tanda	3
11.	Kamera Bawah Laut	4

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, tahun 2016

Peralatan dan mesin lainnya yang menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perikanan lainnya adalah yang terdapat di Balai Benih Ikan Lokal Kota Jayapura dan Outlet Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Tabel.8 Sarana Pendukung Operasional Balai Benih Ikan Lokal Kota Jayapura, tahun 2016

No.	NAMA SARANA	JUMLAH (UNIT)
1.	Kantor/Ruang administrasi	1
2.	Bangsai Produksi	1
3.	Bangsai Panen	1
4.	Rumah Petugas BBI	1
5.	Mess BBI	1
6.	Gedung kultur pakan alami	1
7.	Rumah Genset	1
8.	Sumur Gali	3
9.	Bak Reservoir	2
10.	Ruang Pertemuan	1
11.	Kolam Manajemen Induk Nila	10
12.	Kolam Manajemen Induk Mas	5
13.	Kolam Pendederan Nila dan Mas	10
14.	Bak Lele	12
15.	Bak Ikan Hias	6
16.	Bak Kultur Pakan Alami	4
17.	Bak Filter	2
18.	Gudang Penyimpanan Pakan	1
19.	Biosecurity	5
20.	Pagar	2
21.	Wet Lab	1
22.	Dry Lab	1
23.	Ruang Saprodi	1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, tahun 2016

Sedangkan sarana pendukung operasional outlet pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah seperti pada tabel 9 berikut:

Tabel.9 Sarana Pendukung Operasional Outlet Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Tahun 2016

No.	NAMA SARANA	JUMLAH (UNIT)
1.	Kantor/Ruang administrasi	1
2.	Ruang Display	1
3.	Showroom Ikan Hidup	1
4.	Bangunan Pengasapan	1
5.	Gudang	1
6.	Garasi	1
7.	Sumur Bor dan Bak Penampung	1
8.	Pagar	1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, tahun 2016

b) Sarana Mobilitas

Kendaraan dinas yang digunakan sebagai sarana operasional, seluruhnya dalam kondisi baik dan mencukupi untuk menunjang operasional dinas dalam berbagai kegiatan lapangan.

Tabel.10 Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional Dinas, 2016

JENIS KENDARAAN	JUMLAH (unit)	SUMBER DANA	KONDISI	KET.
Roda Empat				
1. Toyota Innova	1	APBD (DAU)	Baik	Asset Daerah
2. Mitsubishi (Kuda/Diamond)	1	APBD (DAU)	Baik	Asset Daerah
3. Toyota (Kijang/Pic up)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
4. Isuzu (Panther/Pick up)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
5. Toyota (Hailux/Pick up)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
6. Suzuki (APV Luxury)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
Roda Dua				
1. Honda (GL Max)	3	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
2. Honda (Tiger)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
3. Honda (Mega Pro)	1	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
4. Honda (Supra X)	1	APBD (DAU)	Baik	Asset Daerah
5. Honda (Supra X 125)	12	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
6. Honda (Vario 125)	2	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
7. Honda (Supra Vit)	1	APBN	Baik	Aset Pusat
8. Suzuki (Smash 110)	1	APBN	Baik	Aset Pusat
9. Yamaha (Mio)	1	APBN	Baik	Aset Pusat
10. Yamaha (Vega R)	2	APBD (DAK/DAU)	Baik	Asset Daerah
11. Yamaha (New Vixion)	2	APBD (DAK/DAU)	1 unit baik; 1 unit hilang	Asset Daerah
TOTAL	33			

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, tahun 2016

Selain sarana kendaraan/transportasi darat, juga terdapat sarana transportasi laut sebagai penunjang kegiatan lapangan, berupa 5 unit speedboat, dengan rincian 3 unit adalah asset Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, sedang 2 unit lainnya berstatus pinjam pakai Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, seluruh speedboat tersebut dalam keadaan baik dan dipakai untuk kegiatan lapangan.

3) Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan upaya pelayanan di bidang perikanan diperlukan pembiayaan yang memadai. Alokasi Anggaran di bidang Perikanan Kota Jayapura Tahun 2016 termasuk Gaji PNS adalah sebesar Rp. 9.910.999.0000,-. Dari Anggaran tersebut alokasi anggaran pembangunan adalah sebesar Rp. 6.056.467.000,- Atau 61,11%. Untuk itu diharapkan pada tahun – tahun berikutnya alokasi anggaran di Dinas Perikanan Kota Jayapura agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bidang perikanan di Kota Jayapura.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

2.3.1. Produksi Perikanan Tangkap

Sebagai ibukota Propinsi Papua, pertumbuhan penduduk dan ekonomi Kota Jayapura berkembang cukup pesat dan mendorong permintaan komoditas perikanan yang meningkat setiap tahun. Meningkatnya permintaan tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan gizi dan makanan berbahan ikan. Hingga saat ini, usaha perikanan tangkap merupakan penyuplai utama kebutuhan ikan di Kota Jayapura.

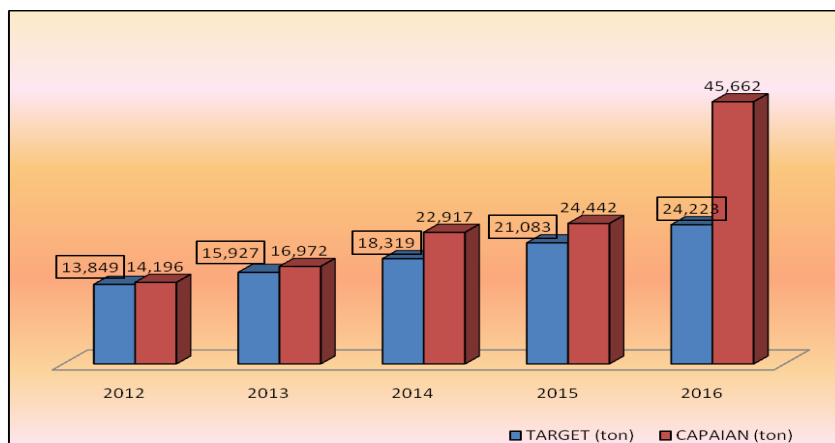
Naik turunnya produksi perikanan tangkap ditentukan oleh banyak faktor, antara lain; (1) keterbatasan armada, (2) keterbatasan alat tangkap dan alat bantu penangkapan, (3) pola arus dan musim, (4) posisi bulan, (5) kondisi ekosistem pesisir, dan lain sebagainya.

Perkembangan produksi perikanan tangkap, armada dan alat tangkap, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 11. Produksi Perikanan Tangkap, Tahun 2012 – 2016

TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PERKEMBANGAN (%)	CAPAIAN TARGET (%)
2012	14.196,00	17,88	102,50
2013	16.972,32	19,56	106,56
2014	22.912,63	35,02	125,10
2015	24.442,00	6,66	115,93
2016	45.661,50	86,82	188,51

Sumber : Bidang Produksi Perikanan, 2016



Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Di Kota Jayapura

Pada tabel 11 dan Gambar 1, Produksi perikanan tangkap Tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dan dapat melampaui target produksi yang telah ditetapkan.

Sedangkan produksi perikanan tangkap per jenis ikan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Produksi Perikanan Tangkap Perjenis Ikan di Kota Jayapura, Tahun 2016

NO	JENIS IKAN	JUMLAH (TON)
1	Tuna	21,769.38
2	Cakalang	6,230.76
3	Tenggiri	156.34
4	Bobara (Kuwe)	169.61
5	Bawal	39.31
6	Kembung	3,258.04
7	Tongkol	728.64
8	Tude	59.62
9	Kawalina	2,347.42
10	Kakap Merah	7.47
11	Salam	1,657.33
12	Deho	1,605.06
13	Mumar	4,999.77
14	Lolosi	54.60
15	Puri	1,024.13
16	Ikan Lainnya	1,554.03
TOTAL		45,661.50

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jenis ikan dominan produksi perikanan tangkap di Kota Jayapura adalah jenis ikan tuna sebesar 21.769,38 ton atau 47,68% dari jumlah produksi total.

Jumlah nelayan pada tahun 2016 di Kota Jayapura adalah 1.239 orang. Dari jumlah tersebut, 45,44% adalah merupakan nelayan non Papua (Buton, Bugis, Makasar), 34,79% adalah nelayan Papua (Serui, Biak), sedang 19,77%-nya merupakan nelayan lokal asli Port Numbay, sebagaimana pada tabel 13.

Tabel 13. Jumlah Nelayan per Kelurahan/Kampung, Tahun 2016

No.	KELURAHAN/ KAMPUNG	JUMLAH NELAYAN (Orang)			TOTAL (Orang)
		Port Numbay	Papua	Non Papua	
I	<u>DISTRIK JAYAPURA UTARA</u>				568
1	Tanjung Ria	15	102	138	255
2	Imbi	3	90	22	115
3	Mandala	-	57	125	182
4	Kayu Batu	16	-	-	16
II	<u>DISTRIK JAYAPURA SELATAN</u>				437
5	Argapura	9	44	21	74
6	Hamadi	3	72	217	312
7	Tobati	14	-	-	14
8	Tahima Soroma	-	24	-	24
9	Entrop	-	13	-	13
III	<u>DISTRIK ABEPURA</u>				121
10	Abepantai	11	20	40	51
11	Waimhork	-	8	-	8
12	Enggros	43	-	-	43
13	Nafri	19	-	-	19
IV	<u>DISTRIK MUARA TAMI</u>				69
14	Holtekamp	18	-	-	18
15	Skouw Sae	19	-	-	19
16	Skouw Mabo	12	1	-	13
17	Skouw Yambe	19	-	-	19
V	<u>DISTRIK HERAM</u>				44
18	Kampung Yoka	32	-	-	32
19	Kel. Waena	12	-	-	12
TOTAL (Orang)		245	431	563	1239

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

Jenis armada yang digunakan untuk menangkap ikan adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor kecil, perahu tanpa motor sedang, motor tempel dan kapal motor. Perkembangan jumlah dan jenis armada tangkap di Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Perkembangan Jumlah dan Jenis Armada Tangkap di Kota Jayapura, Tahun 2012 – 2016

JENIS ARMADA	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanpa Perahu	46	63	76	78	82
Perahu Papan (dayung)					
Kecil (5 – 7 m)	757	764	343	354	357
Sedang (7 – 9 m)	53	60	70	74	79
Besar (9 – 11m)	113	120	103	118	118
Motor Tempel					
Mesin 5,5 HP	99	125	158	165	168
Mesin 6,5 HP	14	34	61	87	92
Mesin 15 HP	213	225	238	278	293
Mesin 25 HP	26	30	43	58	62
Mesin 40 HP	287	292	305	306	307

Kapal Motor					
KM 5 – <10 GT	19	19	108	112	126
KM 10 – 20 GT	2	5	21	22	22
KM 20 – 30 GT	3	3	6	6	5
Total	1.632	1.740	1.532	1.658	1.711

Sumber : Data Bidang Produksi Perikanan, 2016

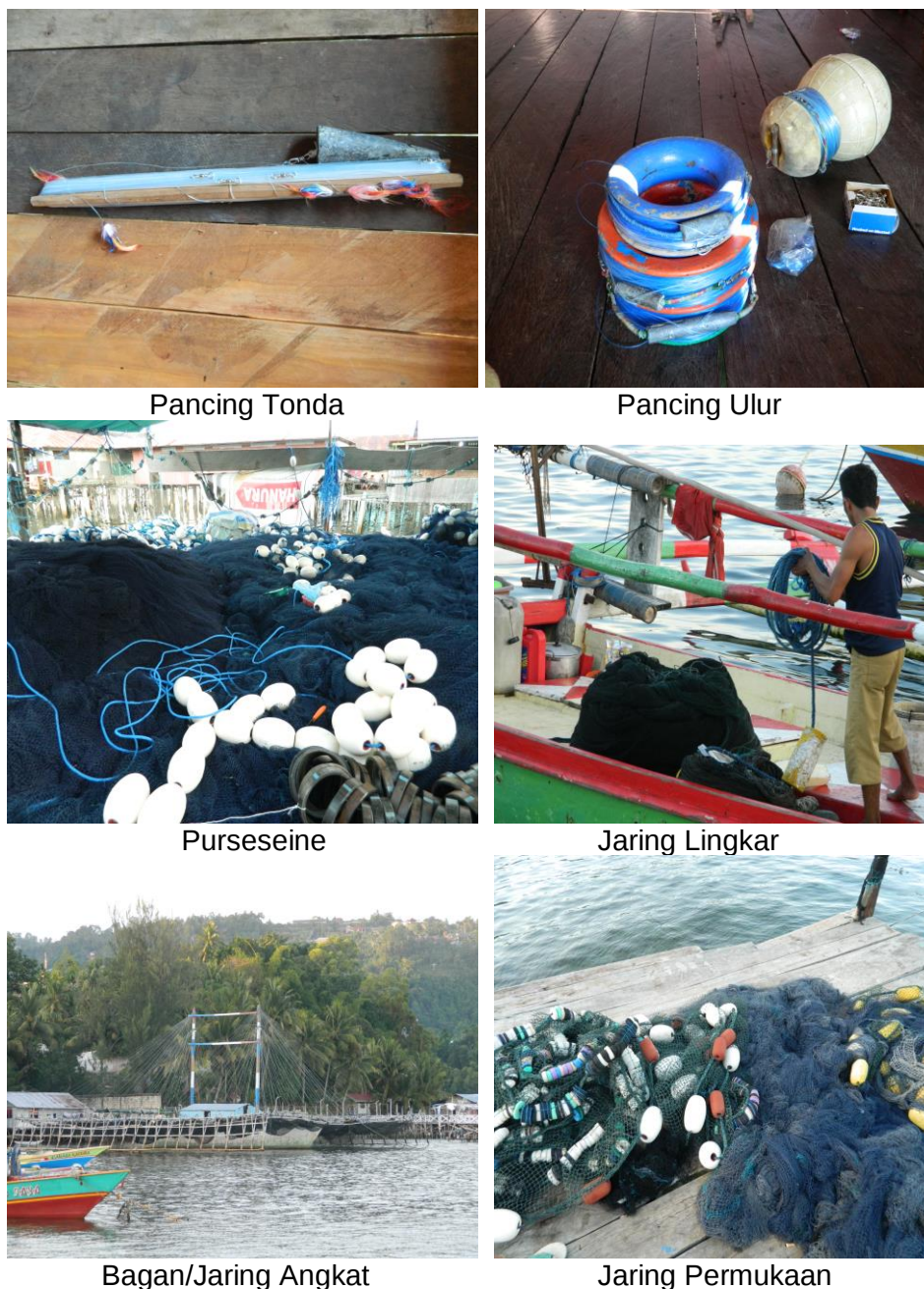


Gambar 3. Kapal Inka Mina, Bantuan KKP-RI



Gambar 4. Perahu dengan armada mesin tempel 15 PK

Alat tangkap yang dominan digunakan nelayan adalah pancing dengan jenis tangkapan ikan demersal atau ikan yang hidup di dekat atau sekitar dasar perairan seperti ikan kerapu, ikan kakap, ikan pari dan ikan pelagis kecil atau ikan yang hidup di sekitar permukaan seperti tongkol dan gembung. Alat tangkap yang lain adalah pancing tonda dengan jenis tangkapan ikan tuna. Selain itu juga terdapat jaring lingkaran untuk menangkap ikan pelagis kecil, jaring insang tetap dengan hasil tangkapan sumberdaya ikan demersal, dan bagan/jaring angkat untuk hasil tangkapan ikan pelagis.



Gambar 5. Alat tangkap yang pada umumnya digunakan oleh nelayan KotaJayapura

Perkembangan jumlah dan jenis alat tangkap di Kota Jayapura tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Perkembangan Jumlah dan Jenis Alat Tangkap di Kota Jayapura tahun 2012-2016

JENIS ALAT TANGKAP	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pukat tarik ikan	47	47	47	52	39
Pukat cincin	53	53	53	58	43
Jaring insang lingkar	117	117	174	176	42
Jaring insang tetap	131	131	131	136	102
Jaring angkat	35	35	35	35	28
Rawai hanyut lain selain tuna	21	21	21	25	109

Rawai tetap	32	32	32	37	28
Pancing tonda	384	384	390	393	573
Pancing ulur	210	210	234	236	177
Pancing tegak	259	259	240	245	184
Pancing cumi	75	75	75	80	60
Pancing lainnya	174	174	152	154	115
Alat penangkap teripang	27	27	0	0	0
Alat penangkap kepiting	15	15	15	15	0
Garpu, tombak, dll	215	215	116	117	0
Total	1.795	1.795	1.715	1.759	1.500

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

Jenis alat tangkap yang dominan digunakan di Kota Jayapura, seperti tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya alat tangkap yang beroperasi di perairan Kota Jayapura berada di wilayah pantai, hal ini tentunya berdampak pada tekanan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir, sementara pemanfaatan sumberdaya laut lepas belum optimal.

2.3.2. Produksi Perikanan Budidaya

1) Budidaya Ikan Air Tawar

Budidaya ikan air tawar merupakan kegiatan perikanan budidaya yang paling pesat perkembangannya di Kota Jayapura. Saat ini terdapat dua distrik utama yang mengembangkan budidaya ikan air tawar, yaitu Distrik Muara Tami dan Distrik Heram. Budidaya ikan air tawar di Distrik Muara Tami berlangsung di kolam-kolam tanah dengan luasan kolam minimal 0,5 Ha perkolam dengan sumber air utama berasal dari aliran irigasi Bendungan Tami.



Gambar 6. Saluran Irigasi Bendungan Tami Distrik Muara Tami



Gambar 7. Saluran irigasi sekunder yang terpelihara dengan baik

Total luas lahan yang sudah dikembangkan menjadi kolam-kolam budidaya di Kota Jayapura sampai dengan tahun 2016 seluas 1.211,66 Ha dari potensi pengembangan seluas 2.081 Ha.



Gambar 8. Areal Kolam di Kelurahan Koya Timur



Gambar 9. Areal Kolam di Kelurahan Koya Barat

Secara keseluruhan, area budidaya ikan air tawar terkonsentrasi di Distrik Muara Tami, dan tersebar di Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur, dengan luasan $\pm$ 1.204,64 Ha pada tahun 2016. Adapun jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan nila dan ikan mas, dan secara alamiah, kedua komoditas tersebut telah terpetakan pengembangannya secara terpisah di dua kelurahan tersebut, ikan nila di Koya Timur dan Ikan Mas di Koya barat.

Selain di kedua kampung tersebut, saat ini kegiatan budidaya ikan air tawar di Distrik Muara Tami, juga sudah mulai dirintis pengembangannya di Kampung Koya Tengah, dengan luasan areal $\pm$ 1,21 Ha pada tahun 2016.



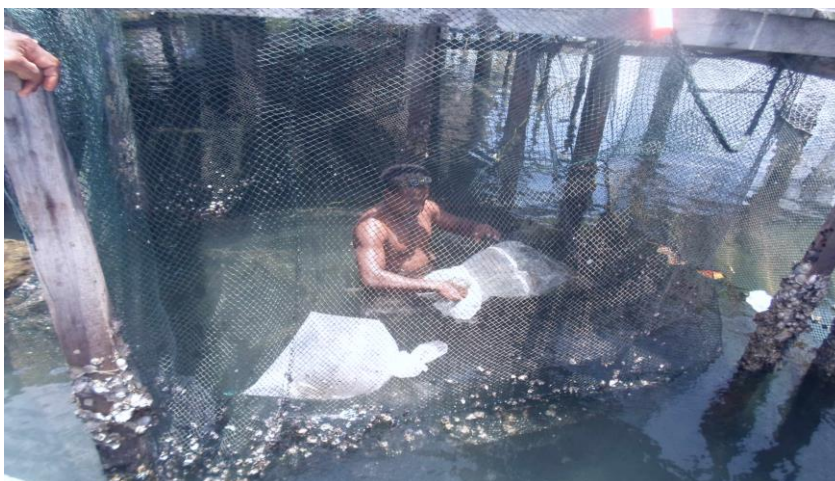
Gambar 10. Areal perkolaman di Kampung Koya Tengah

Selain di Distrik Muara Tami, budidaya ikan air tawar juga dikembangkan di Kampung Koya Koso, Distrik Abepura, dengan komoditas unggulan ikan lele. Luas area budidaya ikan lele yang sudah dikembangkan di Koya Koso adalah $\pm 5,81$ Ha dari potensi pengembangannya sekitar ± 270 Ha dan saat ini sedang dikembangkan budidaya ikan lele dengan sistem kolam bak terpal.



Gambar 11. Budidaya ikan lele dengan sistem kolam terpal di Kampung Koya Koso

Budidaya air tawar sistem keramba dikembangkan di Danau Sentani, yakni di kampung Yoka dan Kelurahan Waena - Distrik Heram. Perkembangan budidaya ikan air tawar di keramba ini tidak secepat budidaya ikan air tawar di kolam-kolam. Luasan budidaya keramba di Distrik Heram tahun 2016, saat ini adalah sekitar 0,46 Ha dari total potensi pengembangan ± 55 Ha. Teknologi budidaya ikan air tawar yang dikembangkan di Distrik Heram sudah tergolong semi intensif karena sudah menggunakan pakan buatan. Jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan nila dengan produktifitas 66 kg per unit KJA pertahun (Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015).



Gambar 12. Budidaya Air Tawar Sistem Keramba Tancapdi Kampung Yoka

2) Budidaya Ikan Air Laut

Kegiatan budidaya laut atau merikultur juga telah berkembang di Kota Jayapura dengan sistem keramba tancap. Kegiatan marikultur di Kota Jayapura berlangsung di Kampung-kampung yang ada di sekitar Teluk Youtefa, yaitu Kampung Tobati, di Distrik Jayapura Selatan, serta Kampung Enggros, Kelurahan Abepantai dan Kampung Nafri di Distrik Abepura. Luas area budidaya laut yang sudah dikembangkan hingga tahun 2016 adalah 928 m² di Distrik Jayapura Selatan dari potensi pengembangan sekitar 20 Ha, dan 1.661 m² di Distrik Abepura dari potensi pengembangan sekitar 160 Ha. Selain di Teluk Youtefa, kegiatan usaha budidaya keramba juga dikembangkan di Kampung Tahima Soroma, Distrik Jayapura Selatan, yang luasannya sampai tahun 2016 adalah 524 m².



Gambar 13. Budidaya Air Laut Sistem Keramba Tancap di Kampung Enggros

3) Budidaya Ikan Air Payau

Kegiatan budidaya air payau telah berkembang sejak tahun 1995 dengan lokasi pengembangan di Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami. Total luas areal budidaya tambak yang sudah dikembangkan di kawasan Kampung Holtekamp adalah sekitar 583 Ha dari total luas potensi pengembangan 1600 Ha dengan produktifitas rata-rata sekitar 1,60 ton/ha/tahun. Selain di Kampung Holtekamp, budidaya air payau ini juga sebenarnya dikembangkan di Kampung Nafri Distrik Abepura, namun luasannya jauh lebih kecil dan karena kurangnya keseriusan usaha, budidaya ikan di kampung ini kurang berjalan baik.



Gambar 14. Tambak di Kampung Holtekamp

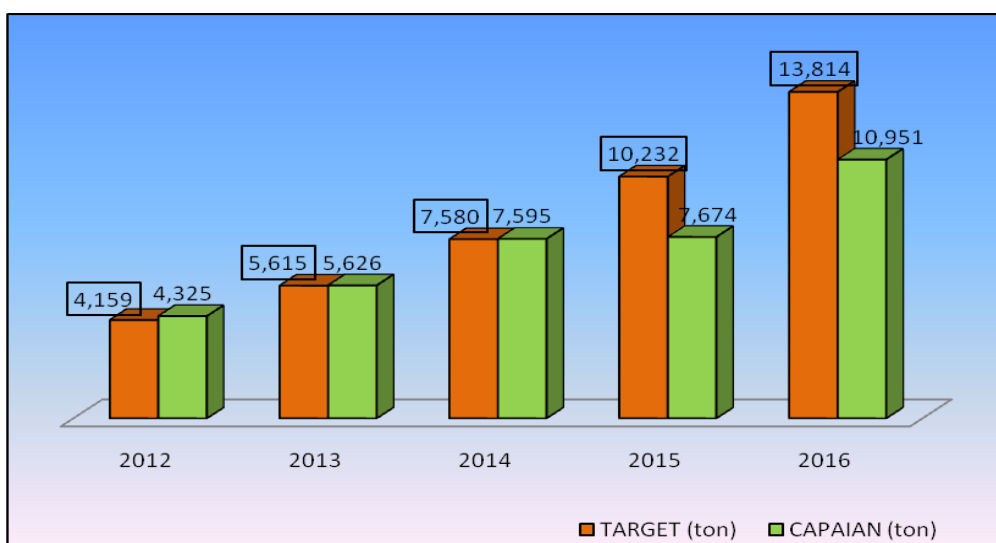
Perkembangan luas lahan budidaya, jumlah produksi, dan jumlah pembudidaya ikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 16. Produksi Perikanan per Jenis Budidaya (ton), Tahun 2012 – 2016

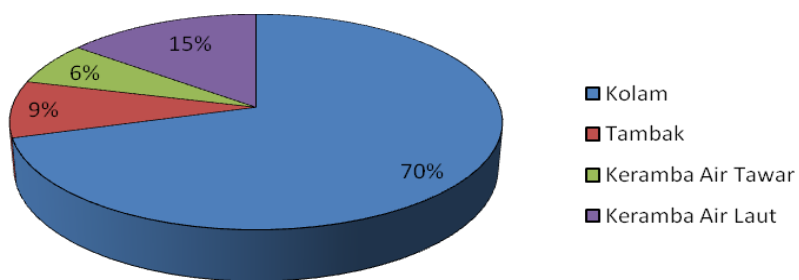
JENIS BUDIDAYA	PRODUKSI (ton) pada TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kolam	3.054,06	4.019,92	5.320,09	5.451,19	7.437,42
Tambak	1.127,07	1.445,07	2.097,38	2.047,62	2.567,28
Keramba Air Tawar	110,55	89,77	108,4	107,74	88,30
Keramba Air Laut	33,32	70,86	68,95	67,77	2,63
Jumlah	4.325	5.625,62	7.594,85	7.674,32	10.095,62

Sumber
Dinas
Kelautan
dan

Perikanan Kota Jayapura, 2016



Gambar 15. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya, Tahun 2012-2016



Gambar 16. Jumlah Pembudidaya Ikan di Kota Jayapura, Tahun 2016

Tabel 17. Jumlah Pembudidaya Ikan di Kota Jayapura, Tahun 2016

JENIS USAHA BUDIDAYA	LOKASI	JUMLAH PEMBUDIDAYA (Orang)
Kolam		2.538
	Koya Tengah	24
	Koya Koso	105
	koya Barat	381
	Koya Timur	1.863
	Gurabesi	90
	Skouw Sae	39
	Imbi	36
Tambak		285
	Holtekamp	273
	Nafri	12
Keramba Air Tawar		216
	Yoka	168
	Waena	48
Keramba Air Laut		486
	Abe Pantai	168
	Enggros	54
	Tobati	144
	Nafri	78
	Kayupulo dll	42

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

Tabel 18. Luasan Areal Budidaya, 2012 – 2016

Sumber
Dinas

JENIS USAHA BUDIDAYA	LUAS AREAL (Ha) perTAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kolam	958,22	1.084,94	1.211,66	1.211,66	1.211,66
Tambak	587,6	587,6	588,5	588,5	588,5
Keramba Air Tawar	0,95	0,47	0,46	0,46	0,46
Keramba Air Laut	0,22	0,31	0,31	0,31	0,31
Jumlah	1.546	1.673,32	1.800,93	1.800,93	1.800,93

kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

2.3.3. Pengolahan Hasil Perikanan

Ikan maupun komoditi perikanan lain, baik ikan mentah maupun produk olahan, termasuk golongan bahan pangan yang sangat mudah mengalami kemunduran mutu/pembusukan (*perishable food*) karena memiliki kandungan air yang cukup tinggi yang dipakai sebagai media pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan proses oksidasi-enzimatis dari jaringan tubuh ikan itu sendiri.

Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan produk bernilai tambah, baik olahan tradisional, maupun modern. Proses pengolahan dapat membuat ikan menjadi awet, beragam tetapi tetap sehat dan bermutu serta memungkinkan untuk didistribusikan dari pusat produksi ke pusat konsumsi.

Aktivitas pengolahan ikan yang diusahakan oleh pengolah di Kota Jayapura setiap tahunnya berkembang cukup baik, karena didukung oleh ketersediaan bahan baku, baik hasil perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Berdasarkan data perkembangan jumlah produksi tahun 2012 – 2016, diketahui bahwa produksi olahan hasil perikanan mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 19. Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan, Tahun 2012 - 2016

NO	JENIS PRODUK	PRODUKSI (TON/TAHUN)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ikan Asap	1.858,26	1.806,66	1.848,66	1.993,48	2.122
2.	Ikan Asin	8	8	8	2,4	3,70
3.	Olahan Bandeng	1,374	5,04	5,46	4,08	6,12
4.	Olahan Baby Nila	0,756	2,4	2,4	2,4	2,70
5.	Olahan Tenggiri	0,269	5,58	5,52	4,8	5,30
6.	Olahan Tuna	-	54,48	54,168	168,576	1.368
Jumlah		1.868,66	1.882,16	1.924,208	2.175,736	3.507,82

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

Kegiatan pengolahan hasil perikanan di Kota Jayapura didominasi oleh produk ikan asap atau ikan asar. Perkembangan jumlah Unit pengolahan (UPI) berdasarkan jenis produk dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Perkembangan Jumlah UPI, Tahun 2012 - 2016

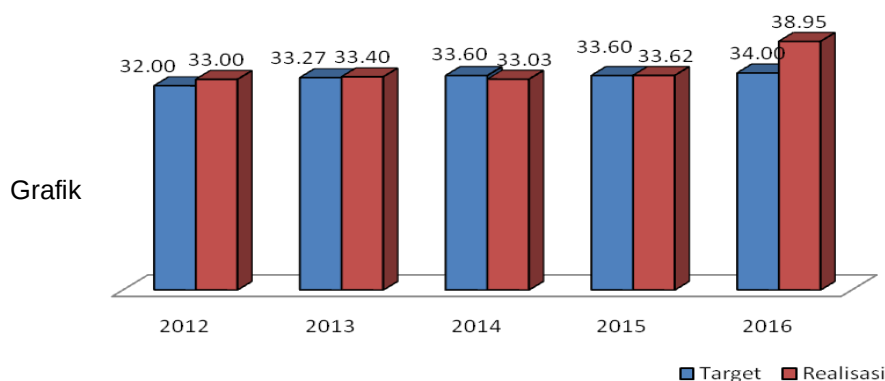
NO	UNIT PENGOLAHAN IKAN BERDASARKAN JENIS PRODUK	JUMLAH UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) UNIT/TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ikan Asap	64	60	63	52	53
2.	Ikan Asin	5	6	6	1	1
3.	Olahan Bandeng	5	4	4	3	3
4.	Olahan Baby Nila	1	1	1	1	1
5.	Olahan Tenggiri	4	3	2	1	1
6.	Olahan Tuna	-	4	5	3	3
Jumlah		79	78	81	61	62

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

2.3.4. Tingkat Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun

Konsumsi ikan perkapita merupakan indikator kecukupan pangan sumber protein dari hasil perikanan. Konsumsi ikan perkapita dari tahun ke tahun diproyeksi akan terus meningkat. Diperkirakan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pengetahuan dan ekonomi masyarakat, serta tumbuhnya kesadaran untuk menjalani gaya hidup sehat, peran ikan sebagai sumber protein hewani masyarakat Kota Jayapura akan terus meningkat. Peningkatan konsumsi ikan dipercaya akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi serta membantu peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan di Kota Jayapura.

Secara rinci, realisasi konsumsi ikan perkapita periode tahun 2012- 2016 dibandingkan dengan targetnya dapat dilihat pada Grafik



17. Target dan Realisasi Peningkatan Konsumsi Ikan Per KapiKota Jayapura

Berdasarkan Grafik 17. terlihat bahwa setiap tahun selama periode tahun 2012-2016 tingkat konsumsi ikan per kapita Kota Jayapura mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita masyarakat yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kota Jayapura mampu dicapai dengan sangat memuaskan.

Tabel 21. Capaian Peningkatan Konsumsi Ikan, Tahun 2012-2016

Tahun	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
2012	33.40	33.20	99,40
2013	33.40	33.27	99,60
2014	33.60	33.03	98,30
2015	33.60	33.62	100,05
2016	34.00	38.95	115,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

2.3.5. Produksi Benih Ikan Air Tawar

Kebutuhan benih ikan air tawar di Kota Jayapura dipenuhi oleh hasil produksi Unit Perbenihan Rakyat dan Balai Benih Ikan Lokal Kota Jayapura.

Jumlah Unit Perbenihan Rakyat di Kota Jayapura pada tahun 2016 adalah 23 Unit, dengan jumlah produksi benih mencapai 4.247.760 ekor.

Keberadaan Balai Benih Ikan Lokal Kota Jayapura sangat penting dalam menyediakan benih maupun calon induk unggulan, baik untuk kebutuhan pembudidaya Kota Jayapura, maupun kabupaten lain di sekitar Kota Jayapura, seperti Kabupaten Jayapura, Pegunungan Bintang, Sarmi, Kerom, dan Lanny Jaya. Pada tahun 2016 produksi benih BBIL mengalami peningkatan sebesar 15,86% dari tahun sebelumnya. Demikian juga perolehan Retribusi jasa usaha lainnya dari hasil penjualan benih, mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 6.150.000,-, dimana target 2016 ditetapkan sebesar Rp. 58.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000. Peningkatan ini dicapai melalui berbagai upaya, diantaranya peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan perluasan pasar.

Tabel 22. Data Produksi Benih di UPR dan BBIL,
Tahun 2014 – 2016

JENIS KOMODITI	PRODUKSI (ekor) / TAHUN					
	2014		2015		2016	
	BBIL (1 unit)	UPR (22 unit)	BBIL (1 unit)	UPR (26 unit)	BBIL (1 unit)	UPR (23 unit)
Nila	358.49	12.015.597	146.5	5.067.585	230.500	4.245.360
Calon Induk Nila	0	0	1.2	0	8.2	0
Mas	24.66	1.321.974	35.45	693	21.000	317.800
Lele	13.57	1.923.000	41	204.5	0	4.000
Bawal	0	131.4	0	274,500	0	47.900
Grascap	0	130.2	0	0	0	0
Patin	0	130.5	0	61.67	0	176.300
Mas Koi	2.2	0	0	42,000	0	46.000
Bandeng	0	0	0	50,000	0	0
JUMLAH	398.92	15.652.671	224.15	6.393.255	259.7	4.247.760

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Perikanan Kota Jayapura dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang di ambil dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota Jayapura.

Analisis lingkungan internal Dinas Perikanan Kota Jayapura memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

KEKUATAN (STRENGTH)

- Tersedianya aparatur (ASN) yang meski terbatas dalam kuantitas tetapi memadai dalam kualitas;
- Tersedianya sarana dan peralatan penunjang tugas dan fungsi dinas;
- Tersedianya RENSTRA SKPD, Data Statistik dan Data Evaluasi (kegiatan, pemanfaatan sarana, kelembagaan dan SDM pelaku usaha perikanan);
- Adanya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan perikanan;
- Tersedianya regulasi di bidang perikanan.
- Adanya UPTD yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pelayanan.
- Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 31 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016

KELEMAHAN (WEAKNESS)

- Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya;
- Lemahnya sinkronisasi penerapan aturan pengelolaan perikanan tangkap;
- Kurangnya SDM aparatur yang bersertifikasi di bidang Perbenihan;
- Belum adanya jaminan untuk spesialisasi keahlian di bidang pengawasan mutu, kesehatan ikan dan lingkungan.
- Belum optimalnya penanganan sistem pendataan dan informasi di bidang perikanan;
- Kurangnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi yang tepat guna;
- Akses ke lembaga penyedia modal (Perbankan dan Koperasi) belum maksimal;
- Minimnya jumlah tenaga pendamping dan penyuluh perikanan di tingkat lapang;

PELUANG (OPPORTUNITY)

- Tersedianya sumber daya ikan;
- Tersedianya Lahan pengembangan perikanan budidaya;
- Tersedianya pelaku usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolah dan pemasar);
- Meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditi perikanan dari tahun ke tahun.
- Adanya Program Pusat yang mendukung kegiatan perikanan (tangkap dan budidaya) di daerah;
- Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha perikanan (tangkap dan budidaya);
- Tingkat kepercayaan Lembaga Keuangan untuk membantu pelaku usaha perikanan yang makin meningkat.
- Kesediaan nelayan untuk tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE);
- Kesediaan pelaku usaha tergabung dalam Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) sesuai hamparan;
- Adanya kemauan pembudidaya untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara perbenihan ikan yang baik (CPIB).

TANTANGAN/ANCAMAN (THREAT)

- Tingginya jumlah produk olahan perikanan (segar beku/olahan) yang masuk dari luar Kota Jayapura
- Rendahnya manajemen usaha dari pelaku usaha perikanan.
- Rendahnya keseriusan pembudidaya lokal dalam mengembangkan usahanya;
- Rendahnya SDM pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya sesuai standart mutu;
- Tingginya konversi ekosistem mangrove dan destruktctif
- Masih tingginya potensi pencemaran perairan pesisir dan laut;
- Masih rendahnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi;
- Masih adanya pemakaian bahan-bahan peledak baik bom, racun, potassium atau bahan peledak sejenisnya;

- Masih adanya program pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan potensi wilayah
- Perairan laut yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kota Jayapura

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kota Jayapura

Uraian Pilihan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Jayapura. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura, meliputi:

- Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh perikanan, sehingga sangat mempengaruhi kontinuitas pendampingan.
- Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha perikanan
- Belum adanya jaminan untuk spesialisasi keahlian di bidang pengawasan mutu, kesehatan ikan dan lingkungan.
- Konversi Mangrove dan Potensi pencemaran perairan yang cukup tinggi.
- Rendahnya penerapan standar teknologi pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan
- Rendahnya SDM pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya sesuai standart mutu;
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan lembaga perbankan dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha
- Tingkat sedimentasi Bendungan Tami yang tinggi dan jadwal normalisasi yang tidak mengikuti jadwal produksi mempengaruhi usaha budidaya perikanan air tawar.
- Ketersediaan air bersih di BBIL yang belum optimal di BBIL mengakibatkan produksi benih dan induk unggul kurang optimal.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2012-2016; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Jayapura yang terpilih untuk masa bakti 2018-2022; berpedoman pada RPJPD Kota Jayapura 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Prov Papua dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 – 2017 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka **visi pembangunan Kota Jayapura Tahun 2018-2022 adalah:**

“Terwujudnya Kota Jayapura Yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern, Berbasis Kearifan Lokal”



VISI tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Beriman ; merupakan wujud hidup masyarakat Kota Jayapura yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku, yang bercirikan moral keagamaan yang kuat, cinta kasih, toleransi, damai, kebersamaan, keberagaman, kemitraan

di antara umat beragama, dan kelestarian lingkungan hidup sebagai cermin pribadi manusia yang bermartabat.

Bersatu ; merupakan komitmen bersama seluruh komponen bersama seluruh komponen masyarakat dalam membangun pemahaman sebagai pelaku pembangunan yang dapat secara aktif memberikan saran kongkrit dan positif dalam membangun Kota Jayapura dari berbagai aspek pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mandiri ; menunjukkan bahwa warga kota harus terjamin atas upaya pemenuhan mata pencaharian sesuai profesi dan keahlian masing-masing untuk membuka peluang meningkatkan pendapatan yang layak bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bercirikan masyarakatnya (1) mampu mengelola potensi daerah, (2) mampu mengurus rumah tangganya sendiri, (3) mampu membuka peluang investasi.

Sejahtera ; mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Jayapura untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Modern ; adalah Kota cerdas (*Smart City*), dan maju yang telah mencirikan pada kota dengan ; (1) akses teknologi yang tepat, (2) menjaga lingkungan tetap lestari, (3) menjaga kebersihan kota bersih, (4) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota, (5) menjaga kondisi keamanan, (6) memberikan pelayanan publik berbasis teknologi, (7) bebas dari kawasan kumuh, dan (8) Kota Layak Anak.

Kearifan Lokal : adalah pemberdayaan dan pelestarian unsur-unsur nilai kebudayaan dan adat-istiadat, dengan (1) mempertahankan nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, (2) mengelola potensi kampung sebagai daya tarik wisatawan dan (3) membangun kampung sebagai identitas Port Numbay.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan **MISI** pembangunan Kota Jayapura Tahun 2018-2022, adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup umat beragama;
2. Meningkatkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional;
3. Membangun kota yang bersih, indah, aman dan nyaman;
4. Meningkatkan kualitas hidup dan sumberdaya masyarakat;
5. Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan supremasi hukum dan kualitas demokrasi;
7. Memperkuat hak adat dan memberdayakan masyarakat adat dan kampung;
8. Mengejawantahkan Nawa Cita dalam pembangunan daerah.

Sesuai RPJMD Kota Jayapura 2018-2022, Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jayapura yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Jayapura Tahun 2018-2022 yang berhubungan dengan bidang perikanan adalah ;

- Tujuan : Kota Jayapura Sebagai Kota Jasa, dan Perdagangan
 Sasaran : Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah

Strategi dan Fokus Kebijakan Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Misi Kelima Strategi Ketiga dan Keempat ;

Sesuai dengan Misi Kelima: *“Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan”*; pada urusan kelautan dan perikanan, strategi ketiga *“meningkatkan kuantitas, kualitas dan nilai produksi perikanan budidaya berbasis komoditi unggulan daerah”*, dengan fokus kebijakan, (1) pengembangan infrastruktur pendukung dan penyediaan sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan, (2) penerapan teknologi budidaya perikanan tepat guna, (3) peningkatan SDM Pembudidaya dan pendampingan usaha perikanan, (4) peningkatan penerapan pengawasan aturan mengenai perikanan, Sedang pada strategi keempat yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap, dengan fokus kebijakan, (1) revitalisasi armada dan penyediaan sarana prasarana tangkap, (2) penerapan aplikasi teknologi perikanan tangkap tepat guna, (3) peningkatan SDM nelayan serta pendampingan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap, (4) pengendalian usaha perikanan tangkap ramah lingkungan (5) peningkatan kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran perikanan, (6) peningkatan pengawasan dan pengendalian keamanan produk perikanan, (7) peningkatan sistem pembinaan mutu produk perikanan, (8) peningkatan sistem logistik hasil perikanan, (9) peningkatan SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui pendampingan usaha, (10) penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan (11) peningkatan diversifikasi, promosi dan akses pasar produk perikanan

3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, yang terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, maka Renstra Kementerian dan Kelautan RI 2015-2019 dititikberatkan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, social dan lingkungan secara berkelanjutan.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah : ***“ Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat”***.

Visi KKP mengandung 3 esensi, yaitu kedaulatan (*Soverrignity*), Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Kemakmuran (*Prosperity*).

Dari visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga keladulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
- 2) Memperkuat jati diri sebagai Negara maritime/kepulauan.
- 3) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
- 4) Mewujudkan usaha kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang didukung oleh sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan IPTEK yang inovatif.
- 5) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim/kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan. Sedangkan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 – 2019 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tujuan yang akan dicapai dibagi dalam empat perspektif, sebagai berikut :

- 1) Kontribusi KKP bagi pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi stakeholders.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pelanggan (masyarakat kelautan dan perikanan)
- 3) Internal process. Proses kerja kunci yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi KKP dan
- 4) Learning and Growth. Pemenuhan mutu SDM, organisasi, informasi dan teknologi, dan anggaran dikelola.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Propinsi Papua

Untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mandiri dan berdaya saing, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua mendukung visi Gubernur Papua “Papua bangkit, Mandiri dan Sejahtera” dan misi Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, percepatan konektivitas pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung visi Gubernur Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis 5 (lima) wilayah adat dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Wilayah adat Mamta, Wilayah adat Saireri, Wilayah adat Mee-pago, Wilayah adapt La-pago dan wilayah adat Ha-anim.

Khusus untuk Wilayah Adat Mamta, pembangunan kelautan dan perikanan dititikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya (ikan nila, ikan mas, ikan lele) dan perikanan tangkap (jenis tuna, tongkol dan cakalang).

Program yang akan dilakukan untuk mewujudkannya adalah ;

- 1) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya dengan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi;

- 2) Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 3) Menciptakan peluang usaha dengan peningkatan pelayanan, promosi dan mempermudah perizinan kepada investor;
- 4) Melakukan kemandirian usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar melalui penguatan modal;
- 5) Mengelola dan memelihara sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi aktif pelaku usaha perikanan;
- 6) Meningkatkan infrastruktur dalam rangka percepatan konektivitas;
- 7) Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan secara terintegrasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Jayapura ;

Penataan ruang bertujuan mewujudkan daerah sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta beranda depan Negara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal.

1) Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk mencapai tujuan di atas maka dirumuskan beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 2.1) Penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Mempertahankan aktifitas pelayanan perkotaan skala regional;
 - b. Mempertahankan lahan produktif pertanian dan perikanan pendukung kegiatan pariwisata dan ketahanan pangan;**
 - c. Mengembangkan pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata
- 2.2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana daerah yang terpadu dan merata;
- 2.3) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- 2.4) Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup dan kearifan lokal, dengan strategi :
 - a. Mengembangkan kawasan pendidikan, pertahanan dan keamanan;
 - b. Mendorong pengembangan kawasan peruntukan perumahan secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - d. Mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan buatan;
 - e. Meningkatkan pusat perdagangan;
 - f. Meningkatkan kawasan budidaya pertanian;
 - g. Mengembangkan kegiatan perikanan dan minapolitan;**
 - h. Mengendalikan kegiatan pertambangan secara terbatas;
- 2.5) Pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- 2.6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dibidang perikanan agar turut mendukung penataan ruang Kota Jayapura sebagai berikut :

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah, guna menggerakkan perkembangan industri lokal, perikanan dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan.
- b. Mendorong pertumbuhan wilayah sentra perikanan yang mandiri di Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Muara Tami;
- c. Mengembangkan kawasan minawisata di Distrik Muara Tami, Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, serta kawasan minapolitan di Distrik Muara Tami dan Abepura sebagai andalan pengembangan kawasan di wilayah Kota Jayapura;
- d. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di Distrik Muara Tami, Abepura dan Heram, melalui optimasi kawasan pada kawasan pertanian (dalam arti luas) dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap di WPP RI 717, mendorong pengembangan budidaya perikanan sesuai potensi dan peruntukan lahan, serta mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing.
- f. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan budidaya pesisir.
- g. Melestarikan kawasan penunjang kawasan ekosistem pesisir, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penelitian.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negative terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP).

Isu-isu strategis dari KLHS Kota Jayapura antara lain :

- a. Terjadinya kerusakan hutan diberbagai kawasan DAS yang merupakan penyebab utama terjadinya banjir.
- b. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air;
- c. Belum terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan;
- d. Menurunnya daya dukung lingkungan;
- e. Terdapatnya beberapa lokasi yang telah mengalami perubahan fungsi lahan untuk dijadikan lokasi perumahan;
- f. Alih fungsi lahan kawasan Muara Tami dari kawasan pertanian ke perumahan;
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
- h. Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap eksploitasi sumberdaya alam dan pembangunan;

- i. Terjadinya pencemaran air;
- j. Fasilitas TPS yang belum memadai dan
- k. Meningkatnya laju erosi dan sedimentasi di perairan.

Berdasarkan isu strategis KLHS tersebut di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kajian lingkungan hidup strategis yang mendukung Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) di bidang perikanan adalah :

- a. Kawasan sempadan pantai di Kota Jayapura, sebagai kawasan prioritas sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, harus dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian fungsi pantai.
- b. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tetap mengacu pada konsep pembangunan *blue economy* atau pembangunan perikanan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada kawasan sentra nelayan di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Abepura, sedang pengembangan perikanan budidaya diarahkan pada daerah pengembangan minapolitan yang berbasis kawasan, yakni Distrik Muara Tami dan abepura.
- c. Dalam pengelolaan perairan (termasuk pencemaran air) diperlukan intervensi dalam ; Pembuatan kebijakan, perencanaan dan koordinasi (*policy making, planning and co-ordination*), persiapan regulasi (*preparation.adjustment of regulations*), monitoring, penegakan hukum (*enforcement of legislation*), serta pelatihan dan penyebaran informasi (*training and information dissemination*).
- d. Keterlibatan stakeholder yang mendukung pembangunan bidang perikanan harus tergeneralisasi secara baik terutama dalam penerapan kebijakan.
- e. Masyarakat (umum dan adat setempat) harus menjadi pelaku pembangunan perikanan dan harus terpengaruhi oleh pengelolaan sumber daya perairan tersebut.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura, dalam lima tahun mendatang (2018-2022) adalah sebagai berikut :

- Permintaan Produk Perikanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menuntut ketersediaan ikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh perikanan, sehingga sangat mempengaruhi kontinuitas pendampingan.
- Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha perikanan
- Rendahnya penerapan standar teknologi pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan
- Rendahnya SDM pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya sesuai standart mutu;
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan lembaga perbankan dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha
- Tingkat sedimentasi Bendungan Tami yang tinggi dan jadwal normalisasi yang tidak mengikuti jadwal produksi mempengaruhi usaha budidaya perikanan air tawar.
- Rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan.
- Belum optimalnya produksi induk dan benih unggul di BBIL.

BAB IV

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi menjelaskan arah menuju suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, sehingga terlihat kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan serta mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Walikota Jayapura periode 2018-2022 yaitu :

“Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern Berbasis Kearifan Lokal”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi pembangunan Kota Jayapura yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut, adalah :

9. Meningkatkan kualitas hidup umat beragama;
10. Meningkatkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional;
11. Membangun kota yang bersih, indah, aman dan nyaman;
12. Meningkatkan kualitas hidup dan sumberdaya masyarakat;
13. Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan;
14. Meningkatkan supremasi hukum dan kualitas demokrasi;
15. Memperkuat hak adat dan memberdayakan masyarakat adat dan kampung;
16. Mengejawantahkan Nawa Cita dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota Jayapura, seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) *organizer*.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kota Jayapura beserta kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022

1	Peningkatan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	55,146.00	71,621.14	93,201.57	121,615.71	160,141.43
2	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Jayapura	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	40.50	41.30	41.50	42.00	42.30

3. Tujuan dan Sasaran OPD Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mewujudkan Misi kelima : Mengembangkan Potensi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Pariwisata dan Utilitas Kota Yang Berwawasan Lingkungan, dengan tujuan Mewujudkan Kota Jayapura sebagai kota jasa dan perdagangan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi perikanan;
- 2) Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kelima
RPJMD Kota Jayapura, Tahun 2018-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1 Kota Jayapura sebagai Kota Jasa dan Perdagangan	1 Meningkatnya produksi perikanan	1 Jumlah produksi perikanan (ton/tahun)
	2 Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura	2 Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

4. Strategi dan Kebijakan OPD

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan 2018-2022, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mewujudkan Misi Kelima : Mengembangkan Potensi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Pariwisata dan Utilitas Kota Yang Berwawasan Lingkungan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima
Renstra Dinas Perikanan, 2018-2022

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Jayapura, dan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Jayapura serta mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka Dinas Perikanan Kota Jayapura, menetapkan Program dan Kegiatan.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Tujuan program ini adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya berbasis komoditi unggulan daerah, dengan sasaran meningkatnya volume (kuantitas), mutu (kualitas) dan nilai (value) produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Kesehatan Ikan;
2. Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya;
4. Revitalisasi Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Kota Jayapura;
5. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
6. Pedampingan Kelompok Pembudidaya.
7. Pengembangan Sarana Budidaya Air Tawar/Payau

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Perikanan Budidaya (PB).

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan program ini adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
2. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
4. Penyediaan Peralatan Tangkap Bagi Nelayan OAP;
5. Pembangunan/Rehab dan Operasional TPI.

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Perikanan Tangkap (PT)

c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Tujuan program ini adalah meningkatnya angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Kota Jayapura, dengan sasaran peningkatan volume (*quantity*), mutu (*quality*) dan nilai (*value*) produk olahan unggulan daerah serta peningkatan akses pemasaran hasil perikanan,. Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Perkembangan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;

2. Fasilitasi Perkembangan Promosi dan Akses Pasar Produk Perikanan;
3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
4. Operasional UPTD Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.
5. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSP2).

d. Program Pengembangan Data/Informasi Kelautan dan Perikanan

Tujuan program ini adalah meningkatnya jumlah data dan informasi kelautan dan perikanan yang transparan, akuntabel dan terbarukan dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi, akurasi data dan informasi pembangunan perikanan.

Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Perikanan.

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Sekretariat Dinas/Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (SETDIS).

2. Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Jayapura, Tahun 2018-2022, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp. 3.335.491.345.000,- (*tiga triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta tigas ratus empat puluh lima ribu rupiah*) . Indikasi Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan Dinas Perikanan untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jayapura 2018-2022 adalah :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan sesuai RPJMD 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Produksi perikanan	ton	43,402.10	55,146.00	71,621.14	93,201.57	121,615.71	160,141.43	160,141.43
2	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita	38.95	40.50	41.30	41.50	42.00	42.30	42.300

Indikator kinerja utama sebagaimana pada Tabel 6.1 di atas, digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi kelima ; "Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan", sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Jayapura tahun 2018-2022.

Selanjutnya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas setiap tahun ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang secara bersama-sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan perikanan Kota Jayapura. Adapun indikator kinerja kunci Dinas Perikanan, sebagai berikut :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Kunci OPD Dinas Perikanan Kota Jayapura

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Jayapura, 2018-2022 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan aktif dalam pembangunan perikanan.

Dokumen Renstra ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada pada Dinas Perikanan Kota Jayapura. Disamping itu juga memperhatikan situasi perkembangan masyarakat, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua, serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan.

Target dan sasaran pada Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2018-2022, meliputi sasaran Pemerintah Kota Jayapura dan juga merupakan sasaran kerja Dinas Perikanan Kota Jayapura. Untuk itu, setiap unit kerja Dinas Perikanan, harus dapat menjabarkan sasaran-sasaran tersebut ke dalam Renja Tahunan.

Sasaran Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2018-2022, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh seluruh jajaran lingkup Dinas Perikanan termasuk UPTD Dinas Perikanan.

Upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2017-2022, yg penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, didukung dengan pembiayaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Papua, Pemerintah Daerah Kota Jayapura, juga oleh masyarakat dan swasta.

Monitoring dan evaluasi Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2018-2022, tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup Dinas Perikanan Kota Jayapura termasuk UPTD, dan menunjukkan sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip (AKIP) dalam bentuk (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2018-2022, dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2018-2022, dalam melaksanakan Renstra Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2018-2022, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Jayapura tahun 2018-2022, hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan perikanan tahun 2018-2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yg memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Perikanan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yg jelas.

Jayapura, 2017
Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura

ELSYE P. RUMBELWAN, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508281997122001

Mengetahui :
WALIKOTA JAYAPURA

DR. BENHUR TOMI MANO, MM